

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
(PKPU)

AKD: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM (PKPU)

Bulan: %750 %2023

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Komisi II DPR RI dan KPU RI menyepakati Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa malam (31/10/2023).

"(Komisi II bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah) menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan rapat.

Revisi PKPU ini dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum. Selain itu, rapat ini juga menyepakati dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Yakni peraturan tentang pengawasan capres-cawapres dan pengawasan dana kampanye.

sumber: <https://dpr.go.id/berita/detail/id/47269/t/Komisi+II+Sepakati+Revisi+PKPU+Terkait+Syarat+Usia+Capres-Cawapres>

| JENIS | KETERANGAN | URL |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berita | DPR Bakal 'Kuliti' Hasil Revisi Peraturan KPU Pencalonan Peserta Capres-Cawapres | https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-bakal-kuliti-hasil-revisi-peraturan-kpu-pencalonan-peserta-capres-cawapres-lt6540d101f4210/ |
| Berita | DPR Sahkan Revisi PKPU Tentang Syarat Pencalonan Capres-Cawapres, Sesuaikan Putusan MK | https://nasional.tempo.co/read/1791114/dpr-sahkan-revisi-pkpu-tentang-syarat-pencalonan-capres-cawapres-sesuaikan-putusan-mk |
| Berita | DPR, DKPP, Pemerintah, KPU dan Bawaslu Setujui Revisi PKPU Syarat Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK | https://nasional.tempo.co/read/1791128/dpr-dkpp-pemerintah-kpu-dan-bawaslu-setujui-revisi-pkpu-syarat-capres-cawapres-sesuai-putusan-mk |
| Berita | Junimart Tegaskan KPU Wajib Konsultasi ke DPR Terkait Perubahan Apapun pada PKPU | https://www.dpr.go.id/berita/detail/47270/t/Junimart+Tegaskan+KPU+Wajib+Konsultasi+ke+DPR+Terkait+Perubahan+Apapun+pada+PKPU |
| Berita | Rapat Pembahasan 4 (empat) Rancangan Peraturan KPU terkait Pemilihan Umum | https://jdih.kpu.go.id/berita/detail-4a4d5456526b35555153557a5241253344253344 |
| Jurnal | PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENGURANGI (PENYEBARAN) HOAKS JELANG PEMILU 2024 | chrome-extension://efaidnbmnnn1bpcajpcglclefindmkaj/https://nberkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-18-II-P3DI-September-2023-203.pdf |
| Jurnal | TRANSPARANSI PELAPORAN DANA KAMPANYE WUJUD DEMOKRASI YANG SUBSTANTIF | chrome-extension://efaidnbmnnn1bpcajpcglclefindmkaj/https://nberkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-16-II-P3DI-Agustus-2023-171.pdf |
| Buku | Parliamentary Elections | https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=30797&keywords=pemilihan%20umum |
| Buku | Pemilu Orang Biasa | https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=21332&keywords=pemilihan%20umum |
| Buku | Pemilu serentak 2019 : Sistem kepartaian, & penguatan sistem Presidensial | https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=36835&keywords=pemilihan%20umum |
| Buku | Pengantar Hukum Pemilihan Umum | https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=36485&keywords=pemilihan%20umum |
| Buku | Undang- Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 | https://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=36743&keywords=pemilihan%20umum |
| Undang-undang & Peraturan | PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN | chrome-extension://efaidnbmnnn1bpcajpcglclefindmkaj/https://njdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu019.pdf |
| Undang-undang & Peraturan | PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM | chrome-extension://efaidnbmnnn1bpcajpcglclefindmkaj/https://njdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu015.pdf |
| Undang-undang & Peraturan | PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM | chrome-extension://efaidnbmnnn1bpcajpcglclefindmkaj/https://njdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu018.pdf |

Undang-undang &
Peraturan

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

chrome-extension://efaidnbmnnn
\nibpcajpcglclefindmkaj/https://
\njdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/
\n2023pkpu020.pdf